



PEMBUKAAN KONGRES RAKYAT NASIONAL (NPC) DI BEIJING

Suasana delegasi menghadiri sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Balai Agung Rakyat di Beijing, Tiongkok, Sabtu (5/3). Foto diambil dengan lensa mata ikan.

AS Dilaporkan Persiapkan Pemerintahan Ukraina di Pengasingan

AS dan sekutunya merencanakan bagaimana membantu membangun dan mendukung pemerintah di pengasingan, yang dapat mengarahkan operasi gerilya melawan Rusia.

WASHINGTON (IM) - Amerika Serikat (AS) dan sekutunya diam-diam mengerjakan "rencana darurat" jika pasukan Rusia berhasil dalam operasi mereka di Ukraina dan memaksa pemerintah saat ini ke pengasingan. Begitu laporan media AS, Washington Post.

Menurut Washington Post, cara negara-negara Barat yang akan mendukung perlawanan Ukraina mulai terbentuk. Namun para pejabat AS dan sekutunya enggan membahas rencana secara terperinci. Tetapi sebagai langkah pertama, sekutu Ukraina merencanakan bagaimana membantu membangun dan mendukung pemerintah di pengasingan, yang dapat mengarahkan operasi gerilya melawan Rusia.

Senjata yang telah diberikan AS kepada militer Ukraina terus mengalir dan akan sangat penting bagi keberhasilan

gerakan pemberontak, kata para pejabat.

Kemungkinan Rusia mengambil alih Kiev telah memicu kebingungan perencanaan di Departemen Luar Negeri AS, Pentagon, dan lembaga pemerintah AS lainnya jika pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus meninggalkan Ibu Kota atau negara itu sendiri.

"Kami sedang melakukan perencanaan darurat sekarang untuk setiap kemungkinan, termasuk skenario di mana Zelensky mendirikan pemerintahan di pengasingan di Polandia," kata seorang pejabat pemerintah AS berbicara dengan syarat anonim seperti dikutip dari Washington Post, Minggu (6/3).

Zelensky, yang menyebut dirinya sebagai "target No. 1" Rusia, tetap berada di Kiev dan meyakinkan warganya bahwa

dia tidak akan pergi. Dia telah berdiskusi dengan pejabat AS tentang apakah dia harus pindah ke barat ke posisi yang lebih aman di kota Lviv, lebih dekat ke perbatasan Polandia.

Detil keamanan Zelensky memiliki rencana yang siap untuk memindahkan dia dan anggota kabinetnya dengan cepat, kata seorang pejabat senior Ukraina. Sejauh ini, dia menolak untuk pergi.

Mykhailo Podolyak, seorang penasihat Zelensky, menolak menjelaskan rencana darurat apa pun yang dibuat Ukraina jika pasukan Rusia merebut ibu kota.

"Orang hanya bisa mengatakan bahwa Ukraina sedang mempersiapkan pertahanan Kiev dengan segala seperti halnya Rusia sedang mempersiapkan serangannya ke Kiev," kata Podolyak.

"Perang ini telah menjadi perang rakyat bagi Ukraina," lanjutnya. "Kita harus memenangkan perang. Tidak ada jalan lain," tegasnya.

Namun demikian, diplomat Eropa, seperti rekan-rekan Amerikanya, mulai mempersiapkan bagaimana mendukung Ukraina jika Kiev jatuh atau negara itu sepenuhnya diduduki oleh Rusia.

Sebuah resolusi PBB minggu lalu yang mengutuk invasi, yang menarik 141 suara, adalah salah satu elemen dari "meletakkan dasar" untuk mengakui pemerintahan Zelensky sebagai pemerintah sah Ukraina dan untuk tetap bertahan bahkan jika tidak lagi mengontrol wilayah, kata seorang senior Eropa diplomat.

"Kami belum membuat rencana, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang kami siap untuk segera bergerak," kata diplomat itu.

"Dalam pengalaman kami, sangat membantu untuk mengetahui secara umum bahwa Anda memiliki dukungan internasional," imbuhnya.

Para pemimpin Eropa telah mencoba untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pemenang. Mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas, meskipun diplomat Eropa mengatakan bahwa Putin kemungkinan berusaha untuk membuat Ukraina menjadi negara yang jauh lebih kecil.

Di bawah skenario itu, Ukraina barat akan tetap merdeka. Wilayah lain akan dimasukkan ke dalam Rusia, diduduki, atau dinyatakan sebagai negara merdeka, seperti yang telah dilakukan Kremlin dengan wilayah

Donetsk dan Luhansk.

Tetapi kemampuan Rusia untuk memaksakan visi itu paling tidak mungkin, kata diplomat itu, mengingat kemarahan yang mendalam di Ukraina terhadap invasi Rusia. "Ini adalah negara berpenduduk 40 juta (orang)," kata diplomat itu.

"Kremlin dapat mencoba memiliki strategi. Tapi saya pikir dalam perhitungan strategis kami, kami selalu melupakan satu kendala kecil, dan itu adalah kehendak rakyat. Putin telah lupa bagaimana dipilih secara demokratis," imbuhnya.

Para pemimpin NATO juga mengatakan bahwa bahkan jika Rusia merebut Kiev, itu tidak akan mengakhiri perlawanan, maupun keberadaan negara Ukraina. "Rusia tidak dapat menduduki seluruh negara dan menaklukkannya," kata Menteri Pertahanan Latvia Artis Pabriks, yang negaranya mempertahankan layanan diplomatik di pengasingan selama 51 tahun setelah diduduki pada tahun 1940 oleh Uni Soviet.

Washington tidak pernah mengakui pencaplok tiga negara Baltik. "Akan ada perang partisan, akan ada perlawanan. Jadi meskipun Kyiv jatuh, itu tidak berarti perang berakhir," kata Pabriks. ● tom

Putin Sebut Sanksi Anti-Rusia Sama dengan Deklarasi Perang

MOSKOW (IM)-Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan keputusan memulai operasi khusus di Ukraina bukanlah keputusan yang mudah. Dia menekankan Moskow berusaha menyelesaikan konflik Donbass secara damai.

Dia mengatakan Kiev seharusnya menghentikan orang-orang Donbass untuk berbicara bahasa Rusia dengan bebas dan hidup sesuai keinginan mereka sendiri, tetapi pihak berwenang Ukraina malah mengorganisir blokade wilayah tersebut.

Presiden Rusia mengumumkan operasi khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022 dengan alasan terus berlanjutnya penembakan di Donbass oleh pasukan Kiev, dan perlunya demilitarisasi dan de-Nazifikasi Ukraina.

Lebih lanjut Putin mengatakan Rusia telah mendeteksi munculnya pejuang dari Timur Tengah di Ukraina, yang mencoba menggunakan "mobil jihad" yang dilengkapi dengan bahan peledak untuk menyerang militer Rusia. "Sejauh ini, serangan ini tidak berhasil," ujar Putin. Presiden menegaskan, sejauh ini operasi militer di Ukraina berjalan sesuai rencana.

"Saya kira tentara kita akan menyelesaikan semua tugas yang dihadapinya. Saya tidak meragukannya sedikit pun. Seluruh jalannya operasi membuktikan, semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai jadwal yang mereka lakukan adalah menghancurkan seluruh infrastruktur militer, yah tidak semua, tetapi sebagian. Terutama gudang senjata, amunisi, penerbangan, sistem pertahanan udara," ungkap Putin, dilansir Sputnik pada Minggu (6/3).

Putin juga menguraikan salah satu tujuan operasi khusus yakni de-Nazifikasi Ukraina. Dia menjelaskan bahwa pendukung nasionalis dapat ditemukan di banyak negara, bahkan di Rusia, tapi hanya di Ukraina mereka diizinkan mengekspresikan pandangan mereka secara terbuka dan hanya di sana mereka didukung di tingkat pemerintah.

"Apakah Anda melihat ribuan orang berjalan di sekitar ibu kota dengan obor? Apakah Anda melihat orang-orang (berbaris) dengan swastika dan dengan obor ini seperti di Jerman pada

1930-an? Apakah kita mendukung mereka yang membunuh orang Rusia, Yahudi, bahkan orang Polandia yang sama" dalam perang (Dunia Kedua)? Apakah kita menjadikan mereka pahlawan? Tapi (di Ukraina) mereka melakukannya dan (orang-orang ini) didukung," tegas Putin.

Tentang Sanksi Barat dan Kesiapan Pasukan Nuklir Rusia Presiden Putin melanjutkan untuk mengomentari tanggapan Barat terhadap operasi khusus, yang mereka sebut "invasi".

Putin mengatakan bahwa keputusan negara-negara Barat untuk mencanangkan sanksi anti-Rusia "sama dengan deklarasi perang". "Banyak dari apa yang terjadi, dari apa yang kita lihat sekarang dan apa yang kita hadapi, tentu saja merupakan cara untuk melawan Rusia," tegas Putin.

Putin mencatat bahwa meskipun demikian, tidak ada darurat militer atau keadaan darurat yang akan diberlakukan di Rusia. Dia menambahkan darurat militer hanya dapat diterapkan jika ada ancaman eksternal yang luar biasa, yang sejauh ini tidak ada yang terwujud.

Presiden mengungkapkan, bagaimanapun, bahwa pasukan pencegahan (nuklir) Rusia berada dalam siaga tinggi setelah menteri luar negeri Inggris mengatakan bahwa NATO "terlibat" dalam konflik Ukraina. Presiden menekankan penerapan zona larangan terbang di atas Ukraina oleh negara mana pun akan dilihat Rusia sebagai partisipasi dalam konflik.

Sebelumnya, AS dan negara-negara NATO lainnya berulang kali menolak permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memperkenankan zona larangan terbang seperti itu, dengan alasan bahwa hal itu kemungkinan akan memicu perang antara blok tersebut dan Rusia.

Operasi khusus diluncurkan Putin pada 24 Februari dengan tujuan mendemilitarisasi dan de-Nazifikasi Ukraina. Presiden mengatakan Rusia tidak memiliki pilihan lain selain bertindak setelah Kiev gagal menerima perjanjian Minsk selama delapan tahun dan secara sistematis mencoba membatalkannya. ● gul

Tiongkok Desak Rusia-Ukraina Gelar Perundingan Langsung

BEIJING (IM)-Tiongkok mendesak diadakannya perundingan langsung antara Rusia dan Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi saat berbicara via telepon dengan koleganya dari Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, setelah invasi Moskow memasuki hari kesepuluh.

Pembicaraan itu menandai panggilan pertama antara diplomat top negara itu sejak awal permusuhan yang ditandai dengan pemboman berat Rusia dan perlawanan sengit dari pejuang Ukraina yang mempertahankan kendali atas ibukota Kive.

Tiongkok telah menempuh jalur diplomatik yang hati-hati sejak konflik dimulai, menolak untuk mengutuk tindakan Moskow setelah bulan lalu menggambar-gambarkan persahabatan "tanpa batas" antara kedua negara.

Tetapi sementara AS dan banyak negara lain telah memperlakukan berbagai sanksi terhadap Moskow, Tiongkok belum menyebut krisis itu

sebagai perang. Wang mengulangi kerumitan masalah itu pada hari Sabtu, dengan mengatakan itu berkaitan erat dengan kepentingan keamanan semua pihak.

Dia menambahkan bahwa AS, NATO, Uni Eropa dan Rusia harus melakukan dialog dan memperhatikan dampak negatif dari ekspansi NATO yang terus menerus ke arah timur pada lingkungan keamanan Rusia sebuah poin pembicaraan yang sangat penting bagi Moskow. Sementara itu, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, Blinken mengatakan dunia sedang menonton untuk melihat negara mana yang membela prinsip-prinsip dasar kebebasan, penentuan nasib sendiri dan kedaulatan.

"Dunia bertindak serempak untuk menolak dan menanggapi agresi Rusia, memastikan bahwa Moskow akan membayar harga tinggi," kata Blinken.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell juga mengatakan bahwa Tiongkok harus menengahi

pembicaraan damai di masa depan antara Rusia dan Ukraina karena kekuatan Barat tidak dapat memenuhi peran tersebut.

"Tidak ada alternatif. Harus Tiongkok, saya yakin itu. Diplomasi tidak bisa hanya Eropa atau Amerika. Diplomasi China memiliki peran untuk dimainkan di sini," kata Borrell dalam wawancara dengan harian Spanyol El Mundo, Sabtu (5/3).

"Kami belum memintanya dan begitu juga mereka (Tiongkok), tetapi karena itu harus menjadi kekuatan dan baik AS maupun Eropa tidak dapat menjadi (penengah), maka Tiongkok yang bisa," ujarnya.

Borrell mengatakan "jelas" bahwa UE dan Amerika Serikat tidak dapat menengahi dan mengesampingkan kehidupan kembali apa yang disebut format Normandia, kerangka kerja diplomatik empat arah yang melibatkan Rusia, Ukraina, Prancis, dan Jerman.

Hampir 1,37 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak awal invasi, menurut data terbaru PBB. ● ans



LOKASI SERANGAN UDARA DI KYIV - UKRAINA

Puing-puing berserakan di sekitar lubang di sebuah jalan di lokasi dimana beberapa rumah yang rusak akibat ledakan, menyusul serangan udara di Bila Tserkva, Kyiv Oblast, Ukraina, Sabtu (5/3), dalam foto yang didapatkan dari media sosial.

Hong Kong Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

HONG KONG (IM)-Kamar mayat hampir penuh, rumah sakit kewalahan, dan panic buying dialami warganya karena takut akan lockdown di seluruh kota. Hong Kong kini menghadapi gelombang infeksi yang kian melonjak di tengah kebijakan nol Covid-nya sejak pandemi melanda dua tahun lalu.

Hong Kong pernah dipuji sebagai negara yang sukses meminimalkan kasus Covid-19. Namun kini keadaan berbalik, Hong Kong justru sedang berjuang melawan wabah mematikan meskipun memiliki lebih dari dua tahun untuk mempersiapkannya. Kota berpenduduk 7,4 juta itu mencatat kasus yang ditularkan secara lokal melonjak melewati 312 ribu hanya dalam dua pekan terakhir. Rumah sakit dan petugas kesehatan menghadapi nyata lonjakan akan SARS-CoV-2 pada warganya.

Angka tersebut pun diprediksi lebih tinggi karena munculnya kecemasan warga yang tidak melaporkan hasil tes positif karena takut dipisahkan dari keluarga dan dimasukkan ke dalam fasilitas isolasi pemerintah. Dilansir laman CNN, Minggu (6/3), kasus Covid-19 di Hong Kong dipicu oleh varian Omicron yang diteliti tidak menyebabkan sakit parah dan kematian. Kendati demikian kematian di Hong Kong karena virus korona meningkat terutama di antara orang tua yang tidak divaksin.

Menurut Our World in Data, Hong Kong melaporkan lebih banyak kematian per juta orang dalam seminggu hingga

3 Maret daripada negara atau wilayah mana pun. Pemimpin kota Carrie Lam mengatakan, Hong Kong menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dia menegaskan tidak ada yang bisa memprediksi gelombang terbaru. Tetapi menurut ahli virologi klinis Universitas Hong Kong Siddharth Sridhar, situasi Hong Kong adalah bencana yang dapat diprediksi dan dicegah.

Selama dua tahun, ketika pandemi berkecamuk di seluruh dunia, sebagian besar Hong Kong memang ada virusnya, dan ada optimisme yang berkembang bahwa kota itu mungkin akan menjauhkan virus itu selamanya. Namun ketika kasus meningkat, pemerintah mencerpakan kembali aturan ketatnya, membatasi pertemuan publik menjadi dua, menutup restoran dan bar setelah pukul 6 sore, dan menutup taman bermain umum.

Namun itu masih belum cukup. Pemerintah berencana untuk meluncurkan uji coba massal wajib dalam upaya untuk membersihkan kota dari Covid-19. Sekolah akan libur musim panas lebih awal dan digunakan kembali sebagai fasilitas isolasi, pengujian, dan vaksinasi. Dan masih belum jelas apakah lockdown seluruh kota akan terjadi sehingga panic buying muncul diantara para warganya.

"Maret akan menjadi waktu yang sangat, sangat sulit. (Ini) jelas merupakan krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Hong Kong," kata Sridhar. ● gul

PBB Sebut Jumlah Pengungsi Ukraina Terus Bertambah

KIEV (IM)-Badan Pengungsi PBB (UNHCR) menyebutkan, lebih dari 1,2 juta orang telah meninggalkan Ukraina setelah Rusia menyerang negara itu pada 24 Februari 2022 lalu. Menurutnya, lebih dari setengah dari mereka (53,7%) melarikan diri ke Polandia, sementara yang lain mencari perlindungan di Hungaria, Moldova, Slovakia, dan Rumania, serta tempat-tempat lain. "Tingkat eksodus ini cukup fenomenal," papar juru bicara UNHCR Joung-ah Ghedini-Williams pada Sabtu (5/3).

Dia menambahkan bahwa, "Ada banyak lagi yang bergerak." "Juga ada kemungkinan jumlah yang sama di dalam negeri yang menjadi pengungsi internal," ungkap Ghedini-Williams.

Rusia bersikeras bahwa mereka terpaksa menyerang tetangganya untuk mempertahankan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR), yang memisahkan diri dari Ukraina tak lama setelah kudeta 2014 di Kiev. Moskow juga mengatakan sedang melakukan "demilitarisasi dan denazifikasi" negara itu. Sementara itu, Ukraina mengatakan serangan itu sepenuhnya tidak beralasan dan meminta bantuan masyarakat internasional.

Ukraina menuduh Rusia menembaki daerah permukiman di Kiev dan tempat-tempat seperti Kharkov, kota terbesar kedua di negara itu. Moskow bersikeras bahwa pasukannya hanya menyerang sasaran militer, seperti lapangan terbang dan stasiun radar. Lebih dari 96.000 orang meninggalkan DPR dan LPR ke Rusia sesaat sebelum invasi, menurut Kementerian Darurat negara itu. Pejabat lain menyebutkan angka itu mencapai 120.000 orang. Kiev dan kedua republik yang memisahkan diri itu selama bertahun-tahun saling menuduh melakukan berbagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata 2014-2015.

Sementara itu, sedikitnya 351 orang di Ukraina dipisahkan tewas dan 707 lainnya mengalami luka sejak pasukan Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, meski angka sebenarnya kemungkinan "jauh lebih tinggi", menurut misi pemantau PBB. Sebagian besar korban sipil tewas akibat penggunaan senjata peledak, termasuk penembakan dari artileri berat dan sistem peluncur banyak roket serta serangan udara. Akibatnya, area terdampak pun meluas, kata pemantau dari OHCHR. ● ans



KRISIS UKRAINA

Seorang anak yang melarikan diri dari invasi Rusia di Ukraina membawa anjingnya di stasiun kereta Zahony, Hungaria, Sabtu (5/3).

Korea Utara Uji Coba Sistem Pengintaian Satelit

SEOUL (IM) - Kantor berita KCNA melaporkan Korea Utara (Korut) menggelar tes "penting lain" untuk sistem pengintaian satelit. Uji coba itu diumumkan satu hari setelah pihak berwenang militer Korut melaporkan peluncuran rudal balistik kedua dalam satu pekan. Peluncuran tersebut memicu kecamaran dari Amerika Serikat (AS), Korea Selatan (Korsel) dan Jepang yang khawatir Korut sedang mempersiapkan tes senjata berat dalam beberapa bulan ke depan. Menurut mereka, peluncuran satelit merupakan tes tersebelubung teknologi rudal yang dilarang resolusi Dewan Keamanan PBB.

KCNA melaporkan peluncuran yang digelar Administrasi Pengembangan Antarkasa Nasional (NADA) Korut dan Akademi Ilmu Pertahanan "berdasarkan rencana pengembangan satelit pengintai." Peluncuran ini merupakan tes perangkat satelit kedua pekan ini dan peluncuran rudal kesembilan tahun ini. "Melalui tes ini, NADA mengkonfirmasi keandalan transmisi data dan sistem penemuan satelit, sistem komando kendali, dan berbagai sistem kendali di darat lainnya," kata KCNA dalam laporan mereka, Minggu (6/3).

Seperti tes pada 27 Februari lalu dalam laporannya kali ini, KCNA juga tidak menjelaskan rudal yang digunakan dalam peluncuran tersebut. Tapi pihak berwenang Korsel mengatakan tampaknya rudal balistik ditembakkan di sekitar Pyongyang yang menjadi lokasi bandara internasional. Militer Korsel mengatakan rudal Korut terbang setinggi 560 kilometer dan sejauh 270 kilometer. Saat perundingan denuklirisasi masih mengalami kebuntuan, tes rudal Korut pada Januari lalu tembus rekor. Hal itu dapat menandakan Pyongyang akan kembali menggelar uji coba senjata nuklir atau rudal balistik antar-benua (ICBM) untuk pertama kalinya sejak 2017.

Uji coba rudal Sabtu (5/3) kemarin digelar beberapa hari sebelum pemilihan presiden Korsel pada Rabu (9/2) mendatang. Pemerintah Korut bersiap menghadapi upaya Korut meluncurkan satelit pengintai ke orbit dalam waktu dekat. "Setiap peluncuran satelit dapat menimbulkan dampak serius, teknologinya sama dengan yang digunakan untuk meluncurkan ICBM," kata Lee Jong-seok, penasihat kebijakan luar negeri calon presiden Lee Jae-myung.

Korsel juga mendorong rencana untuk meluncurkan kendaraan antariksa mereka sendiri. Sesuatu yang tidak dilarang Dewan Keamanan PBB. Kantor berita Yonhap melaporkan pada bulan ini Korsel berencana untuk menggelar uji coba proyektil luar angkasa bahan bakar padat. Sebagai salah satu proyek untuk menggerakkan satelit pengintai militer mereka sendiri untuk memantau Korut. ● gul